



| KORAN          | HAL |
|----------------|-----|
| Haluan         |     |
| Padang Ekspres |     |
| Singgalang     | A5  |
| Pos Metro      |     |
|                |     |

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

## DUGAAN KORUPSI PENGADAAN ALKES

# Tiga Tersangka Sudah Ditahan

### PADANG - SINGGALANG

Penyidik Polresta Padang telah melakukan penahanan terhadap tiga tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rasidin tahun anggaran 2013.

"Hingga saat ini yang sudah kami tahan tersangka dengan inisial AS, IH dan SP," ujar Kasat Reskrim Polresta Padang, AKP Edriyan Wiguna, Senin (16/9).

AS merupakan mantan direktur utama rumah sakit milik pemerintah itu. Sementara IH dan SP merupakan pihak swasta. IH sendiri tercatat sebagai anggota DPRD Kota Bandung periode 2019-2024. "Kami menahan tersangka IH pada Jumat (13/9) lalu setelah dilakukan pemeriksaan di Mapolresta. Atas surat panggilan yang dikirim pada Jumat lalu ia datang dan langsung kami periksa. Setelah diperiksa, tersangka langsung kami

tahan," lanjutnya.

Sedangkan SP yang ditahan sejak Sabtu (14/9) lalu, juga setelah dilakukan pemeriksaan.

"Untuk tersangka ketiga ini kami tahan setelah melakukan pemeriksaan," ungkapnya.

Sebelumnya, AS ditahan pada Rabu (11/9) lalu. Penahannya dititipkan di sel Mapolsek Padang Timur yang dikhususkan untuk tahanan wanita.

Dugaan korupsi ini pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang anggarannya berasal dari APBN tahun 2013. Dalam prosesnya diduga terjadi sejumlah pelanggaran, dan manipulasi anggaran, dan kesimpulan telah terjadi tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan wewenang yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. "Modus dugaan korupsi dilakukan dengan cara mengangkat harga satuan barang dari alat kesehatan, membuat dokumen fiktif dan mengatur proses lelang," ujarnya.

Kasus tersebut berawal dari laporan masuk dari masyarakat pada Maret 2016. RSUD Rasidin Padang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dekonsentrasi APBN-TP 2013 sebesar Rp10 miliar pada Februari 2013. Kemudian, Kementerian Kesehatan RI melalui Ditjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) mengundang dokter RSUD dr Rasidin untuk melakukan penelaahan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dengan melampirkan dokumen perbandingan.

Setelah semuanya beres, lalu keluar Surat Keputusan (SK) Wali Kota Padang tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Setelah SK keluar, barulah dilakukan proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Padang.

Pada proses lelang dilakukan evaluasi oleh panitia terhadap dokumen penawaran yang masuk dari empat peserta lelang. Sampai akhirnya ditetapkanlah oleh panitia sebagai pemenang

lelang PT SMP, yang beralamat di Jakarta Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp9 miliar. Pelaksanaan kontraknya dimulai pada 1 Juli 2013 sampai serah terima barang pada November 2013. Hingga proses pelaksanaan pengadaan selesai, PT SMP telah menerima pembayaran 100 persen sesuai dalam kontrak.

Menurutnya, dari proses penyelidikan, ditemukan beberapa penyimpangan, mulai dari dugaan mark-up harga satuan barang alat kesehatan, membuat dokumen fiktif, pengaturan lelang dan perubahan spesifikasi teknis barang yang dipersyaratkan dalam dokumen kontrak dengan yang diserahkan kepada RSUD dr Rasidin. "Terkait perkara tersebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan sekitar 45 orang saksi, termasuk ahli. Dari hasil pemeriksaan saksi dan ahli, adanya potensi kerugian negara yang nilainya ditaksir miliaran rupiah dan saat ini sedang dilakukan penghitungan oleh BPK RI," ujarnya. (109)